

— **STATISTIK** —
PENDIDIKAN
KABUPATEN WAKATOBI
2018



— **STATISTIK** —
PENDIDIKAN
KABUPATEN WAKATOBI
2018



Statistik Pendidikan Kabupaten Wakatobi 2018

Nomor ISBN : -
Nomor Publikasi : 74070.1903
Katalog BPS : 4301002.7407

Ukuran Buku : 17.6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 46 halaman

Naskah
Seksi Statistik Sosial
BPS Kabupaten Wakatobi

Penyunting
BPS Kabupaten Wakatobi

Gambar Kulit
BPS Kabupaten Wakatobi

Diterbitkan oleh
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi

Dicetak oleh

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar

Publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 merupakan lanjutan dari publikasi sebelumnya yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Wakatobi. Publikasi ini memuat berbagai informasi umum terkait kondisi dan refleksi perkembangan pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Wakatobi, yaitu menyangkut masalah Angka Melek Huruf (AMH), pendidikan anak usia dini, rasio murid-guru, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, tingkat pendidikan, sampai dengan akses teknologi informasi di tingkat wilayah Kabupaten Wakatobi. Data-data pokok yang digunakan sebagian besar bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diolah BPS Kabupaten Wakatobi serta data-data lain yang relevan untuk dijadikan sebagai bahan penunjang analisis.

Kami menyadari meskipun telah diupayakan secara maksimal, akan tetapi publikasi ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya publikasi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wangi-wangi, Maret 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Wakatobi



Toweddy Marthinus Layico, S.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Grafik.....	xi
Ringkasan.....	1
Pendahuluan.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sumber Data.....	4
Istilah Teknis.....	5
Kondisi Pendidikan Kabupaten Wakatobi Tahun 2018.....	11
3.1 Angka Melek Huruf.....	11
3.2 Pendidikan Anak Usia Dini.....	13
3.3 Rasio Murid-Guru.....	15
3.4 Partisipasi Sekolah.....	17
3.5 Tingkat Pendidikan.....	21
3.6 Akses Teknologi Informasi.....	25
Lampiran.....	27

Daftar Tabel

No	Judul Tabel	Hal
1	Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru pada Jenjang Pendidikan TK sederajat di Kabupaten Wakatobi, 2018	15
2	Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru pada Jenjang Pendidikan SD sederajat di Kabupaten Wakatobi, 2018	15
3	Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru pada Jenjang Pendidikan SMP sederajat di Kabupaten Wakatobi, 2018	16
4	Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru pada Jenjang Pendidikan SMA sederajat di Kabupaten Wakatobi, 2018	16
5	Rasio Murid-Sekolah dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Wakatobi, 2018	17
6	Umur Standar di Setiap Jenjang Pendidikan	19
7	Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Status Bersekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (persen), 2018	23
8	Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (persen), 2018	23
L1	Jumlah Sekolah di Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2018	29
L2	Jumlah Murid di Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2018	29
L3	Jumlah Guru di Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2018	30
L4	Jumlah Sekolah di Luar Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2018	30
L5	Jumlah Murid di Luar Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2018	31
L6	Jumlah Guru di Luar Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2018	31
L7	Jumlah Sekolah Setingkat Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018	32

L8	Jumlah Sekolah Setingkat Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018	32
L9	Jumlah Sekolah Setingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018	33
L10	Jumlah Sekolah Setingkat Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018	33
L11	Jumlah Murid Setingkat Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018	34
L12	Jumlah Murid Setingkat Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018	34
L13	Jumlah Murid Setingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018	35
L14	Jumlah Murid Setingkat Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018	35
L15	Jumlah Guru Setingkat Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018	36
L16	Jumlah Guru Setingkat Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018	36
L17	Jumlah Guru Setingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018	37
L18	Jumlah Guru Setingkat Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018	37
L19	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Binongko, 2018	38
L20	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Togo Binongko, 2018	39

L21	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Tomia, 2018	40
L22	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Tomia Timur, 2018	41
L23	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Kaledupa, 2018	42
L24	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Kaledupa Selatan, 2018	43
L25	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Wangi-Wangi, 2018	44
L26	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 2018	45
L27	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kabupaten Wakatobi, 2018	46

Daftar Grafik

No	Judul Grafik	Hal
1	Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi, 2018	12
2	Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wakatobi, 2018	12
3	Persentase Anak Umur 0-6 Tahun yang Sedang dan Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah Dirinci Menurut Kelompok Umur, 2018	14
4	Angka Partisipasi Sekolah Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi, 2018	18
5	Angka Partisipasi Kasar Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (persen), 2018	20
6	Angka Partisipasi Murni Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (persen), 2018	21
7	Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Bersekolah Dirinci Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wakatobi (persen), 2018	22
8	Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (persen), 2018	24
9	Persentase Pengguna Internet Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Wakatobi, 2018	26

Ringkasan

1. Pada tahun 2018, terjadi penurunan Angka Melek Huruf (AMH) di Wakatobi bila dibandingkan dengan tahun 2017. AMH menurun dari 94,71 persen menjadi 89 persen. AMH penduduk laki-laki mencapai 92,43 persen, lebih tinggi daripada AMH penduduk perempuan yang mencapai 85,82 persen.
2. Pada tahun 2018, dari total penduduk Kabupaten Wakatobi umur 0-6 tahun, hampir seperempat, yakni 23,57 persen masih mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran 2017/2018, sedangkan yang pernah mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran 2017/2018 atau ajaran sebelumnya sekitar 9,19 persen.
3. Rasio murid-guru di Kabupaten Wakatobi sudah cukup baik. Untuk TK Sederajat rasio murid-guru sekitar 9,04; SD Sederajat rasio murid-guru sekitar 11,67; sedangkan rasio murid-guru untuk SMP Sederajat sekitar 8,54; dan rasio murid-guru untuk SMA Sederajat sekitar 10,93.
4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) umur 7-12 tahun mencapai 99,66 persen, APS umur 13-15 tahun 98,16 persen, sedangkan APS umur 16-18 tahun hanya sebesar 81,58 persen, dan APS umur 19-24 tahun adalah sebesar 17,63 persen.
5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD mencapai 112,25 persen. APK terus menurun pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Adapun APK pada jenjang SMP adalah 89,78 persen, pada jenjang SMA sebesar 88,90 persen, dan pada jenjang diploma ke atas adalah sebesar 16,22 persen.
6. Untuk jenjang SD (7-12 tahun) Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tahun 2018 sekitar 97,48 persen. APM SMP (13-15 tahun) mencapai angka 76,06 persen, APM SMA (16-18 tahun) hanya mencapai 62,31 persen, dan APM untuk jenjang Diploma ke atas hanya mencapai angka 13,63 persen.
7. Pada tahun 2018, penduduk Wakatobi berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah sekitar 7,69 persen. Sementara yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai SD mencapai 22,37 persen.
8. Pada tahun 2018, penggunaan telepon selular meningkat 2,01 persen dibanding tahun 2017 menjadi 69,86 persen. Peningkatan pengguna telepon selular sebanding dengan peningkatan pengguna internet. Pada tahun 2017,

secara umum terjadi peningkatan sebesar 2,01 persen terhadap penduduk umur 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir dari waktu pencacahan, dari 19,87 persen di tahun 2017 menjadi 21,88 persen di tahun 2018.

<https://wakatobikab.bps.go.id>

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2 dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warga negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan

pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Berangkat dari kesadaran pentingnya indikator-indikator pendidikan guna mendapatkan gambaran atau kondisi dan pencapaian di bidang pendidikan di Kabupaten Wakatobi, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi menyusun publikasi berjudul **"Statistik Pendidikan Kabupaten Wakatobi 2018"**.

Publikasi ini menampilkan indikator-indikator umum pendidikan dan perbandingan kondisi pada tahun 2018 dengan tahun sebelumnya. Beberapa istilah yang digunakan juga ditampilkan guna membantu para pengguna data dalam menginterpretasikan dan melakukan analisis atas informasi yang disajikan.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam publikasi Statistik Pendidikan ini adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Wakatobi dan sarana pendidikan yang tersedia di Kabupaten Wakatobi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Diterbitkannya publikasi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data dasar bidang pendidikan di Kabupaten Wakatobi bagi seluruh pengguna data baik pemerintah maupun swasta.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyajian publikasi ini yaitu:

1. Memberikan gambaran kondisi dan pencapaian bidang pendidikan lebih rinci menurut aspek jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan daerah tempat tinggal.
2. Penyediaan indikator utama di bidang pendidikan, serta
3. Menjadi informasi awal bagi pihak pemerintah dan swasta dalam menyusun kebijakan dan strategi di bidang pendidikan.

1.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk data agregat dan komposisi penduduk diperoleh dari proyeksi penduduk;
2. Untuk indikator-indikator pendidikan diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018;
3. Data jumlah sarana pendidikan dan pendukungnya didapat dari data sekunder yang dikumpulkan dari instansi terkait, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi.

Istilah Teknis

Daerah perkotaan adalah suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.

Daerah perdesaan adalah suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.

Penduduk ialah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

Angka Melek Huruf (AMH) ialah perbandingan antara jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis/melek huruf dan jumlah seluruh penduduk umur 15 tahun ke atas di suatu negara atau daerah.

Rumus:

$$AMH_{15+}^t = \frac{MH_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$$

$$ABH_{15+}^t = \frac{BH_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$$

Keterangan:

- AMH_{15+}^t : Angka Melek Huruf penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun t
- ABH_{15+}^t : Angka Buta Huruf penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun t
- MH_{15+}^t : Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun t yang melek huruf
- BH_{15+}^t : Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun t yang buta huruf

P_{15+}^t : Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun t

Manfaat:

Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.

Rumus:

$$APK_{SD} = \frac{P_{SD}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

$$APK_{SMP} = \frac{P_{SMP}}{P_{13-15}} \times 100\%$$

$$APK_{SMA} = \frac{P_{SMA}}{P_{16-18}} \times 100\%$$

Keterangan:

P_{SD} : Jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SD atau sederajat

P_{7-12} : Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun

P_{SMP} : Jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMP atau sederajat

P_{13-15} : Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun

P_{SMA} : Jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMA atau sederajat

P_{16-18} : Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun

Manfaat:

Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap seluruh anak pada kelompok umur tersebut.

Rumus:

$$APM_{SD} = \frac{P_{7-12(SD)}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

$$APM_{SMP} = \frac{P_{13-15(SMP)}}{P_{13-15}} \times 100\%$$

$$APM_{SMA} = \frac{P_{16-18(SMA)}}{P_{16-18}} \times 100\%$$

Keterangan:

- $P_{7-12(SD)}$: Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang bersekolah pada jenjang SD atau sederajat
- P_{7-12} : Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun
- $P_{13-15(SMP)}$: Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang bersekolah pada jenjang SMP atau sederajat
- P_{13-15} : Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun
- $P_{16-18(SMA)}$: Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang SMA atau sederajat
- P_{16-18} : Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun

Manfaat:

Untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat batasan umur.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai.

Rumus:

$$APS_{7-12} = \frac{P_{7-12(Masih Sekolah)}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

$$APS_{13-15} = \frac{P_{13-15(Masih Sekolah)}}{P_{13-15}} \times 100\%$$

$$APS_{16-18} = \frac{P_{16-18(Masih Sekolah)}}{P_{16-18}} \times 100\%$$

Keterangan:

- $P_{7-12(Masih Sekolah)}$: Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang masih bersekolah
- P_{7-12} : Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun
- $P_{13-15(Masih Sekolah)}$: Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang masih bersekolah

P_{13-15}	: Jumlah penduduk berumur 13 -15 tahun
P_{16-18} (Masih Sekolah)	: Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun yang masih bersekolah
P_{16-18}	: Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun

Manfaat:

Untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu.

Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling/MYS) merupakan jumlah tahun yang digunakan penduduk berumur 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Rumus:

Rata-rata Lama Sekolah untuk yang partisipasi sekolahnya Masih Bersekolah dan Tidak Bersekolah Lagi namun "Tidak Tamat":

$$\text{MYS} = \text{Tahun Konversi} + \text{Kelas Tertinggi yang pernah diduduki} - 1$$

Rata-rata Lama Sekolah untuk yang partisipasi sekolahnya Tidak Bersekolah Lagi dan "Sudah Tamat":

$$\text{MYS} = \text{Tahun Konversi} + \text{Kelas Tertinggi yang pernah diduduki}$$

Adapun Tahun Konversi dari Pendidikan yang Ditamatkan adalah:

SD sederajat	: 6 tahun
SMP sederajat	: 9 tahun
SMA sederajat	: 12 tahun
Diploma I	: 13 tahun
Diploma II	: 14 tahun
Akademi/Diploma III	: 15 tahun
Sarjana/Diploma IV	: 16 tahun
Pasca Sarjana/S2	: 18 tahun
Doktor/S3	: 21 tahun

Manfaat:

Untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling/EYS) adalah rata-rata lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Rumus:

$$HLS_{\alpha}^t = FK \times \sum_{i=\alpha}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

HLS_{α}^t : Harapan Lama Sekolah pada umur α di tahun t

E_i^t : Jumlah penduduk umur i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t : Jumlah penduduk umur i pada tahun t

i : Umur ($\alpha, \alpha + 1, \dots, n$)

FK : Faktor koreksi pesantren

Faktor koreksi pesantren dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$FK = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk usia tujuh tahun ke atas}} + 1$$

Keterangan:

- Jumlah santri sekolah dan mukim = rasio santri mukim dikalikan dengan jumlah santri sekolah
- Rasio santri mukim = jumlah santri bermukim dibagi dengan jumlah santri seluruhnya

Manfaat:

Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Rasio Murid-Guru adalah rata-rata jumlah murid/siswa per guru di tingkat pendidikan tertentu pada tahun ajaran tertentu.

Rumus:

$$\text{Rasio}(M - G)_h^t = \frac{M_h^t}{G_h^t}$$

Keterangan:

$\text{Rasio}(M - G)_h^t$: Rasio murid-guru di tingkat pendidikan h pada tahun ajaran t

- M_h^t : Jumlah murid/siswa yang terdaftar di tingkat pendidikan h pada tahun ajaran t
- G_h^t : Jumlah guru yang terdaftar di tingkat pendidikan h pada tahun ajaran t

Manfaat:

Untuk menggambarkan beban kerja seorang guru dalam mengajar dan untuk melihat mutu pengajaran di kelas.

<https://wakatobikab.bps.go.id>

Kondisi Pendidikan Kabupaten Wakatobi Tahun 2018

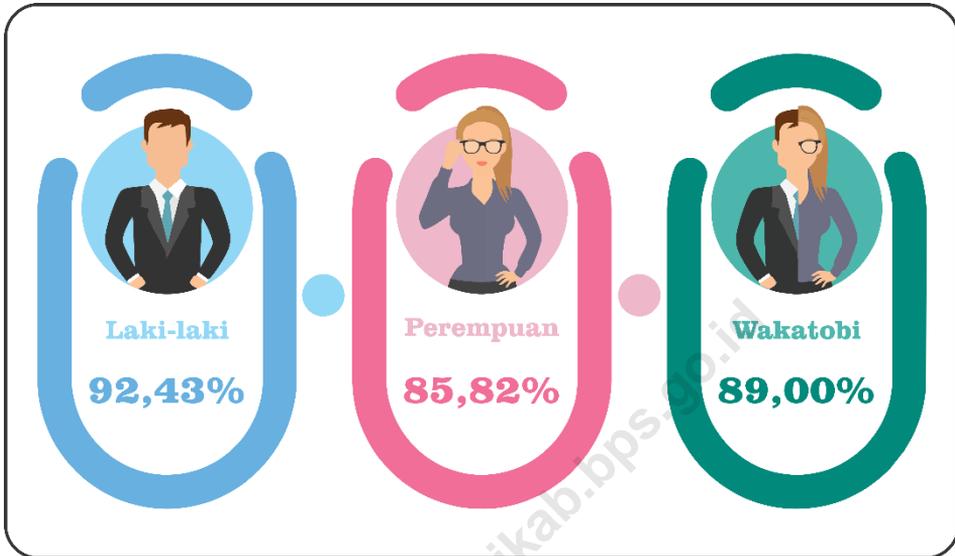
3.1 Angka Melek Huruf

Seseorang dikatakan melek huruf apabila paling tidak orang tersebut dapat menggunakan kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya serta memungkinkannya untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca dan menulis untuk pengembangan diri dan masyarakat. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Angka melek huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Program pemberantasan buta huruf sebetulnya sudah berjalan sejak zaman kemerdekaan, namun dalam perjalanannya terjadi pasang surut bahkan dalam sejarahnya, Indonesia pernah memproklamkan bebas buta huruf. Tetapi karena tidak dipergunakan keterampilan tersebut menyebabkan banyak yang menjadi buta huruf kembali. Program pemberantasan buta huruf mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta berketerampilan. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut, memungkinkan seorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan lain adalah menciptakan tenaga lokal yang potensial guna mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya. Bagi pendidikan, sekolah diharapkan akan mampu menekan angka putus sekolah di pendidikan persekolahan.

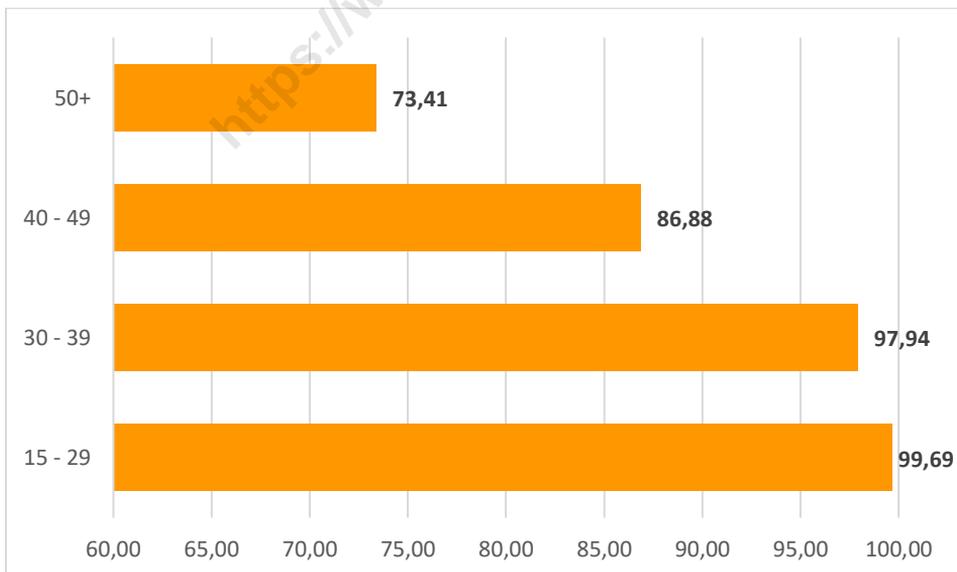
Pada tahun 2018, terjadi penurunan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk umur 15 tahun ke atas di Kabupaten Wakatobi bila dibandingkan dengan tahun 2017. AMH menurun dari 94,71 persen menjadi 89 persen. Berdasarkan jenis kelamin, AMH penduduk laki-laki (92,43 persen) lebih tinggi daripada penduduk perempuan (85,82 persen). Namun demikian, pemerintah tetap harus terus menggalakkan pemberantasan buta huruf di seluruh wilayah agar angka buta huruf dapat semakin turun dari tahun ke tahun mengingat bahwa Indonesia pernah memproklamkan bebas buta huruf. Selain itu, kemampuan membaca dan menulis itu akan sangat dibutuhkan untuk menunjang pada kehidupan sehari-hari.

Grafik 1. Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi, 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018, diolah

Grafik 2. Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wakatobi, 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018, diolah

Jika ditinjau menurut kelompok umur seperti yang ditampilkan pada Grafik 2, maka dapat dilihat bahwa buta huruf sebagian besar terjadi pada kelompok

umur tua (50 tahun ke atas). AMH terbesar terdapat pada kelompok umur 15-29 tahun yaitu sebesar 99,69 persen. Pada kelompok umur 40-49 tahun, AMH mencapai 86,88 persen, lebih rendah dibandingkan kelompok umur 30-39 tahun yaitu sebesar 97,94 persen. Bahkan pada kelompok umur 50 tahun ke atas AMH menjadi semakin rendah yakni 73,41 persen. Dari Grafik 2, kita dapat melihat bahwa semakin tua kelompok umurnya maka angka buta hurufnya pun akan semakin besar. Memang tidak mudah untuk menerapkan program pemberantasan buta huruf terhadap penduduk yang sudah berumur. Diperlukan kesadaran dan peran aktif dari yang bersangkutan untuk mengikuti program keaksaraan fungsional yang terus dikembangkan oleh pemerintah.

3.2 Pendidikan Anak Usia Dini

Aset yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan, sehingga setiap warga wajib mengikuti pendidikan, baik pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Tidak sedikit penduduk yang masih mengabaikan pendidikan anak usia dini, padahal untuk membiasakan diri dan mengembangkan pola pikir anak pendidikan sejak usia dini mutlak diperlukan.

Tiga tahun pertama anak adalah periode emas anak untuk menyerap informasi sebanyak-banyaknya, sehingga pendidikan usia dini adalah sangat penting. Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 50 persen kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berumur 4 tahun. Sehingga periode ini merupakan periode kritis, dimana perkembangan yang diperoleh pada periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan periode berikutnya hingga masa dewasa. Sementara masa emas ini hanya datang sekali, sehingga apabila terlewatkan berarti habislah peluangnya.

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, pasal 1, butir 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan umur enam tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini (prasekolah) ini bertujuan untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Pada tahun 2018, dari total penduduk Kabupaten Wakatobi umur 0 – 6 tahun, 23,57 persen masih mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran 2017/2018. Sebanyak 9,19 persen pernah mengikuti pendidikan pra sekolah sebelum tahun ajaran 2017/2018. Akan tetapi, masih banyak penduduk berumur 0 – 6 tahun yang tidak/belum pernah mengikuti pendidikan pra sekolah yaitu sebanyak 67,25 persen.

Grafik 3. Persentase Anak Umur 0-6 Tahun yang Sedang dan Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah Dirinci Menurut Kelompok Umur, 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018, diolah

Secara total di Kabupaten Wakatobi, dari seluruh anak di usia kritis (0-4 tahun) yang sedang mengikuti pendidikan prasekolah pada tahun ajaran 2017/2018 mencapai 12,87 persen dan yang pernah mengikuti pendidikan prasekolah sebelum tahun ajaran 2017/2018 ada sebanyak 0,27 persen serta yang tidak/belum pernah mengikuti pendidikan prasekolah ada sebanyak 86,86 persen. Jika kita bandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya (18,25 persen), pada tahun ajaran 2017/2018 (12,87 persen) terjadi sedikit penurunan. Hal tersebut masih menunjukkan bahwa peluang untuk memanfaatkan periode kritis hanya dirasakan kurang dari seperlima anak umur kritis di Kabupaten Wakatobi. Kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, di samping faktor ekonomi diduga menjadi penyebab rendahnya persentase tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi informasi tentang manfaat pendidikan usia dini perlu lebih digencarkan.

3.3 Rasio Murid-Guru

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik yang memadai merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan. Pada tahun ajaran 2017/2018, sarana dan prasarana pendidikan baik swasta maupun negeri di Kabupaten Wakatobi terlihat cukup memadai pada semua jenjang pendidikan. Oleh karena itu, diharapkan proses kegiatan belajar mengajar pun menjadi lebih baik.

Tabel 1. Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru pada Jenjang Pendidikan TK sederajat di Kabupaten Wakatobi, 2018

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
TK	154	5.402	595
Negeri	0	0	0
Swasta	141	5.076	537
RA/BA	13	326	58

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi

Tercatat fasilitas pendidikan prasekolah (TK/RA) berjumlah 154 unit yang tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah peserta didik mencapai 5.402 murid. Dengan jumlah tenaga pengajar taman kanak-kanak sebanyak 595 orang, maka secara rata-rata 1 orang guru mengajar 8 hingga 9 anak. Seluruh pendidikan prasekolah ini adalah TK Swasta yang pengelolaannya di bawah yayasan atau kelompok tertentu, dan tidak terdapat TK yang berstatus negeri. Hal ini menunjukkan kepekaan sebagian masyarakat tertentu terhadap pendidikan anak usia dini, sehingga diharapkan masyarakat dari berbagai golongan turut berperan aktif dalam pengembangan kecerdasan anak.

Tabel 2. Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru pada Jenjang Pendidikan SD sederajat di Kabupaten Wakatobi, 2018

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
SD Sederajat	119	12.490	1.070
Negeri	111	11.809	999
Swasta	8	681	71

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi

Untuk tingkat sekolah dasar negeri maupun swasta baik yang dikelola oleh Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama tercatat 119 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 1.070 orang. Dengan jumlah murid 12.490, maka rasio

murid-guru pada tahun ajaran 2017/2018 adalah 11,67 orang. Dengan kata lain secara rata-rata satu orang guru mempunyai beban mengajar sebanyak kurang lebih 11 sampai 12 orang murid.

Tabel 3. Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru pada Jenjang Pendidikan SMP sederajat di Kabupaten Wakatobi, 2018

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
SMP Sederajat	53	6.252	732
Negeri	44	5.601	643
Swasta	9	651	89

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi

Pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP) sederajat, terdapat 53 sekolah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 sekolah atau 20 persen diantaranya berada di bawah Kementerian Agama yang biasa disebut sebagai Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sekitar 20,10 persen dari total siswa yang duduk di SMP/Sederajat mengenyam pendidikan di MTs. Tercatat dari 6.252 siswa di SMP/ sederajat, sebanyak 1.257 siswa diantaranya adalah siswa MTs baik negeri maupun swasta. Cukup besarnya minat siswa untuk belajar pada jenjang ini juga didukung oleh tenaga pengajar yang memadai. Dari total 732 guru untuk jenjang pendidikan ini, sebanyak 170 guru atau sebesar 23,22 persennya mengajar di Madrasah Tsanawiyah. Dari jumlah ini dapat dihitung angka rasio murid-guru, dimana secara rata-rata rasio murid-guru untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat adalah 8,54 atau rata-rata satu orang guru mempunyai beban mengajar sebanyak kurang lebih 8 sampai 9 orang murid. Kecilnya angka rasio murid-guru ini diharapkan dapat menjadi pendorong kegiatan belajar agar lebih efektif karena beban mengajar guru yang semakin kecil sehingga interaksi antar siswa dan pengajar dapat berlangsung maksimal.

Tabel 4. Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru pada Jenjang Pendidikan SMA sederajat di Kabupaten Wakatobi, 2018

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
SMA Sederajat	30	5.737	525
Negeri	20	5.132	433
Swasta	10	605	92

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi

Pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, fasilitas pendidikan menurun jumlahnya. Pada tahun ajaran 2017/2018 terdapat 30 sekolah setingkat SMA negeri maupun swasta. Dari keseluruhan jumlah tersebut 5 (2 negeri, 3 swasta) diantaranya merupakan Sekolah Menengah Kejuruan. SMK Negeri terdapat di Kecamatan Kaledupa sebanyak 1 sekolah dan Wangi-wangi sebanyak 1 sekolah. Sedangkan untuk SMK swasta terdapat di Kecamatan Wangi-wangi sebanyak 1 sekolah dan Tomia sebanyak 1 sekolah. Sementara 6 sekolah berada di bawah pengelolaan Kementerian Agama. Rata-rata beban sekolah untuk tingkat pendidikan ini adalah 191 sampai 192 murid untuk satu sekolah dan 10 sampai 11 murid untuk satu guru.

Tabel 5. Rasio Murid-Sekolah dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Wakatobi, 2018

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid-Sekolah	Rasio Murid-Guru
(1)	(2)	(3)
TK Sederajat	35,08	9,08
SD Sederajat	104,96	11,67
SMP Sederajat	117,96	8,54
SMA Sederajat	191,23	10,93

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi, diolah

Rasio murid-sekolah di atas menunjukkan kemampuan sekolah menampung murid. Sedangkan rasio murid-guru menunjukkan beban kerja guru dalam mengajar. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat tingkat mutu pengajaran di kelas karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin kurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Jika melihat kondisi di atas secara umum ketersediaan sekolah dan rasio murid-guru di Kabupaten Wakatobi sudah cukup baik, namun jika dilihat dalam ruang lingkup lebih kecil yakni per kecamatan nampaknya penyebaran sekolah dan guru-guru ini belum begitu merata utamanya untuk tingkat pendidikan di atas pendidikan dasar di daerah terpencil.

3.4 Partisipasi Sekolah

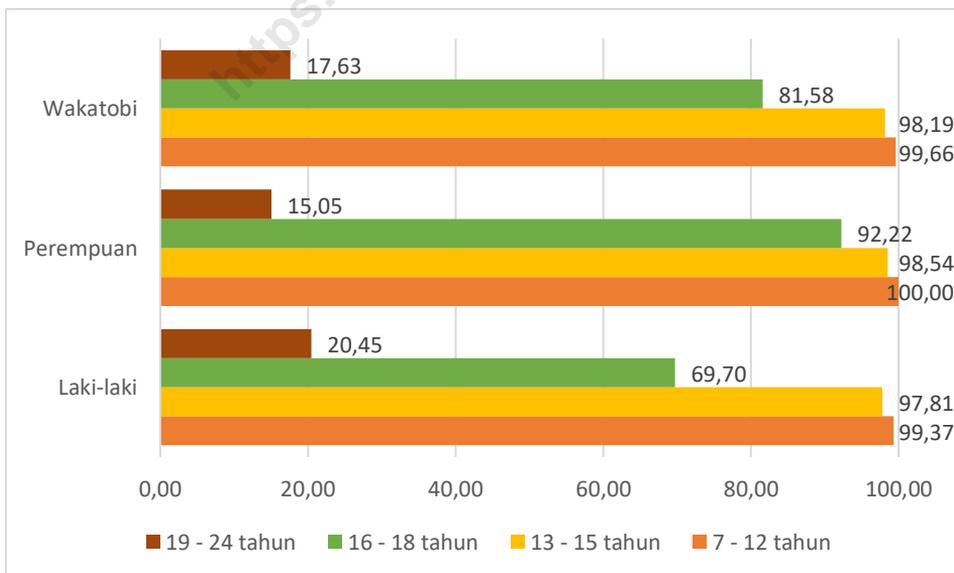
Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk umur sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama umur muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah.

Sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk umur sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Indikator angka partisipasi sekolah dapat digunakan untuk mengukur proporsi keikutsertaan anak pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu.

Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan meningkatkan akses penduduk pada fasilitas pendidikan, sehingga diharapkan makin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Wakatobi telah menunjukkan keberhasilan yang cukup besar. Wajib Belajar 6 tahun yang didukung pembangunan infrastruktur sekolah dan diteruskan dengan Wajib Belajar 9 tahun adalah program sektor pendidikan yang diakui cukup sukses dimana standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 12 tahun lebih dari 95 persen dan APS 13 – 15 tahun lebih dari 70 persen.

Grafik 4. Angka Partisipasi Sekolah Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi, 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018, diolah

Grafik 5 memperlihatkan pada tahun 2018, di Kabupaten Wakatobi APS umur 7 – 12 tahun mencapai 99,66 persen dan APS umur 13 – 15 tahun mencapai 98,19 persen. Meskipun demikian, tidak semua penduduk kelompok umur 7 – 12 tahun, 13 – 15 tahun, dan 16 – 18 tahun masih bersekolah. Selain itu, juga terlihat semakin tinggi kelompok umur tersebut semakin kecil persentase mereka yang bersekolah. Angka partisipasi sekolah di rentang umur 16 – 18 tahun hanya sebesar 81,58 persen. Artinya, hanya terdapat 81 sampai 82 dari 100 anak umur 16 hingga 18 tahun yang menempuh jenjang pendidikan.

Angka partisipasi sekolah penduduk umur 16 – 18 tahun menjadi titik kritis, karena umumnya pada umur menjelang dewasa tekanan psikologis lebih banyak. Pengendalian anak oleh orang tua sangat diperlukan agar anak-anak mereka tetap fokus pada kewajiban bersekolah, tidak terpengaruh oleh godaan mencari pendapatan (bekerja), berumah tangga, dan sebagainya. Namun, kepedulian orang tua dan para pendidik dalam masa kritis ini harus diakui akan sangat ditentukan oleh cara pandang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini perlu ditinjau lebih jauh mengapa mereka tidak bersekolah lagi terutama untuk kelompok umur 7 – 15 tahun dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun.

Maju mundurnya pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak. Pendidikan merupakan kegiatan bersama yang melibatkan banyak unsur, mulai siswa itu sendiri, masyarakat, orang tua, pendidik, sarana dan prasarana, manajemen dan biaya pendidikan, proses belajar mengajar, hingga campur tangan pemerintah. Jadi tanggung jawab pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru atau sekolah atau kementerian pendidikan saja, melainkan semua pihak harus terlibat dalam memajukan dunia pendidikan.

Umumnya, terdapat dua ukuran partisipasi sekolah yang utama, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Keduanya mengukur penyerapan penduduk umur sekolah oleh sektor pendidikan. Perbedaan di antara keduanya adalah penggunaan kelompok umur “standar” di setiap jenjang pendidikan. Umur standar yang dimaksud adalah rentang umur yang dianjurkan pemerintah dan umum dipakai untuk setiap jenjang pendidikan, yang ditampilkan pada tabel berikut.

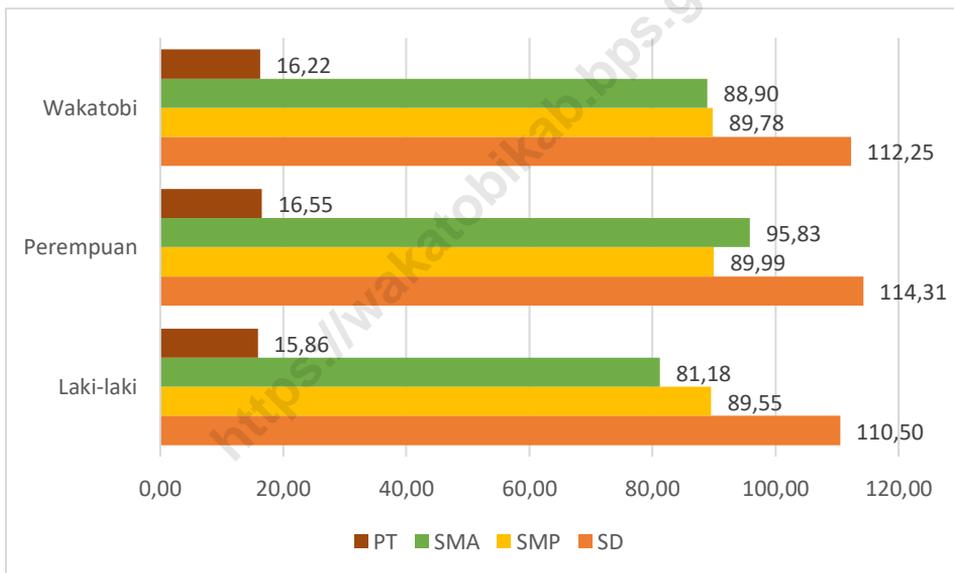
Tabel 6. Umur Standar di Setiap Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Kelompok Umur (Tahun)
(1)	(2)
SD	7-12
SMP	13-15
SMA	16-18
Perguruan Tinggi	19-24

Sumber: Statistik Indonesia, 2010

APK digunakan untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat batasan umur terhadap jumlah anak dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Grafik 5 menunjukkan pada tahun 2018, APK SD mencapai 112,25 persen. Ini berarti bahwa jumlah murid sekolah pada jenjang sekolah dasar lebih besar daripada jumlah penduduk 7-12 tahun atau ada sekitar 12,25 persen penduduk di luar umur SD (7 – 12 tahun) yang bersekolah di SD. APK penduduk Kabupaten Wakatobi semakin menurun seiring jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Pada jenjang SMP, APK menjadi 89,78 persen dan pada jenjang SMA APK mencapai 88,90 persen.

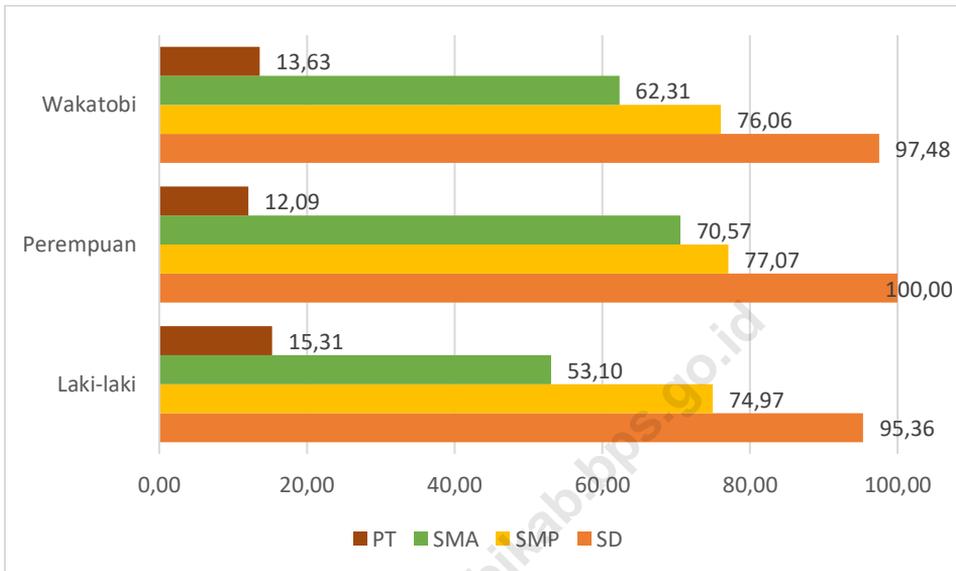
Grafik 5. Angka Partisipasi Kasar Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018, diolah

Sama halnya dengan APK, Angka Partisipasi Murni (APM) juga cenderung menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi (Grafik 6). APM menunjukkan proporsi anak sekolah pada kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Pada APM, umur anak sekolah di setiap jenjang pendidikan sangat diperhatikan. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan banyaknya anak yang sekolah di luar sistem pendidikan, seperti menunda saat mulai bersekolah, murid tidak naik kelas, berhenti/keluar dari sekolah untuk sementara waktu dan lulus lebih awal.

Grafik 6. Angka Partisipasi Murni Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018, diolah

Untuk jenjang SD (7 – 12 tahun) terlihat bahwa APK mencapai 112,25 persen sementara APM 97,48 persen. Selisih 14,77 persen memiliki arti bahwa di antara murid SD/ sederajat sebanyak 14,77 persen berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. APM SMP pada 2018 mencapai angka 76,06 persen sedangkan APK-nya mencapai 89,78 persen. Ini artinya hanya 89,78 persen penduduk umur 13 – 15 tahun yang terserap sebagai siswa SMP, sisanya bisa terserap pada jenjang pendidikan SD, SMA, atau bahkan tidak bersekolah lagi. Selisih 13,72 persen dapat diartikan sebagai jumlah murid SMP yang umurnya berada di luar rentang 13 – 15 tahun. Begitu pula untuk jenjang SMA (16 – 18 tahun), terdapat selisih yang cukup besar, sekitar 26,59 persen siswa SMA yang berumur di atas 18 tahun atau di bawah 15 tahun. Hal ini dimungkinkan karena banyak anak yang bersekolah lebih dini dari anak lain, atau sebaliknya.

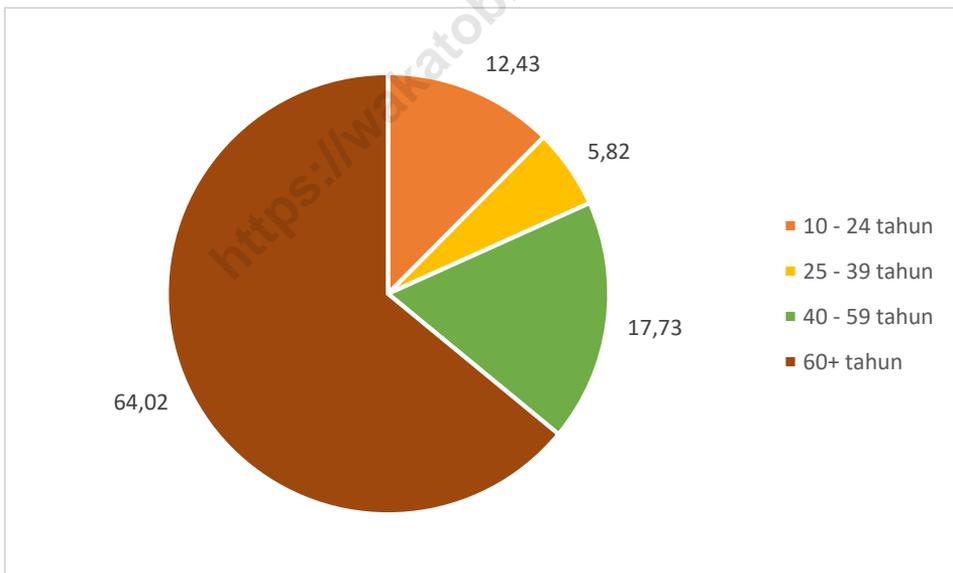
3.5 Tingkat Pendidikan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan juga merupakan salah satu indikator penting yang dapat mencerminkan keberhasilan dalam pembangunan pendidikan dan juga merupakan gambaran tentang kualitas suatu penduduk. Semakin banyak persentase penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi memperbesar peluang semakin baik kualitas SDM-nya.

Dari segi tingkat pendidikan dan status bersekolah, terlihat bahwa persentase penduduk 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah mengenyam

bangku pendidikan relatif rendah, yakni sebesar 6,23 persen. Jika dilihat lebih jauh menurut kelompok umur (Grafik 9), maka dari seluruh penduduk 10 tahun ke atas yang tidak pernah sekolah, ternyata sebagian besar adalah penduduk umur 60 tahun ke atas yaitu sebanyak 64,02 persen, 17,73 persen pada umur 40 – 59 tahun, 5,82 persen pada umur 25 – 39 tahun, dan 12,43 persen pada umur 10 – 24 tahun. Apabila kita melihat secara keseluruhan, semakin tua kelompok umurnya maka semakin besar pula persentase penduduk yang tidak/belum pernah bersekolahnya. Hal ini dikarenakan akses pendidikan pada beberapa puluh tahun silam masih sulit dan pada masa itu sebagian masyarakat belum menyadari pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Walaupun persentasenya semakin mengecil pada kelompok umur yang lebih muda, pemerintah tetap harus memperhatikan masalah ini agar kedepannya angka penduduk yang tidak/belum pernah berekolah dapat lebih diperkecil atau bahkan menjadi tidak ada sama sekali.

Grafik 7. Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Bersekolah Dirinci Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018, diolah

Sementara itu, pada Tabel 7 masih terlihat kesenjangan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan, dimana proporsi penduduk perempuan (7,21 persen) yang tidak pernah sekolah jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki (5,13 persen).

Tabel 7. Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Status Bersekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2018

Status Bersekolah	Laki-laki	Perempuan	Wakatobi
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	5,13	7,21	6,23
Masih Bersekolah	25,89	23,74	24,76
- SD Sederajat	11,10	7,95	9,45
- SMP Sederajat	7,20	6,99	7,09
- SMA Sederajat	6,15	7,32	6,77
- Diploma ke Atas	1,43	1,47	1,45
Tidak Bersekolah Lagi	68,98	69,05	69,01

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018, diolah

Pada Tabel 8, penduduk Kabupaten Wakatobi berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah adalah sekitar 7,69 persen. Kemudian banyaknya penduduk yang tidak/belum menamatkan pendidikannya di bangku Sekolah Dasar relatif besar yaitu sebanyak 32,31 persen. Sementara yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai jenjang SD mencapai 22,37 persen. Itu artinya sekitar 7,69 persen penduduk Kabupaten Wakatobi belum optimal merasakan manfaat pembangunan di bidang pendidikan seperti yang dicanangkan pemerintah pada Program Wajib Belajar 9 Tahun. Proporsi ini bahkan semakin menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Terdapat 14,24 persen yang berhasil menamatkan jenjang SMP sederajat. Kemudian yang berhasil menamatkan jenjang SMA sederajat hanya sebesar 14,35 persen. Bahkan hanya sebanyak 9,04 persen yang berhasil menamatkan jenjang pendidikan diploma ke atas.

Tabel 8. Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2018

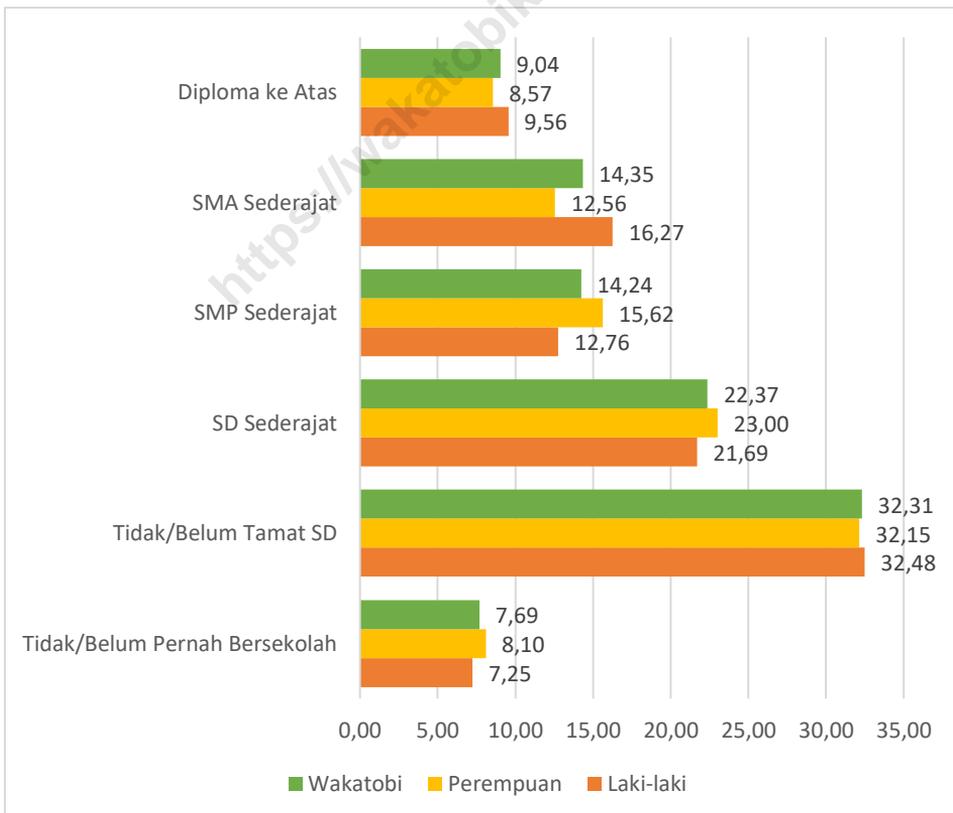
Status Bersekolah	Laki-laki	Perempuan	Wakatobi
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	7,25	8,10	7,69
Tidak/Belum Tamat SD	32,48	32,15	32,31
SD Sederajat	21,69	23,00	22,37
SMP Sederajat	12,76	15,62	14,24
SMA Sederajat	16,27	12,56	14,35

Diploma ke Atas	9,56	8,57	9,04
-----------------	------	------	------

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018, diolah

Dilihat dari sisi jenis kelamin, Grafik 10 memperlihatkan bahwa pada jenjang SD sederajat dan SMP sederajat proporsi penduduk perempuan yang berijazah cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki dengan nilai 23 persen berbanding 21,69 persen untuk tingkat pendidikan terakhir SD sederajat dan 15,62 persen berbanding 12,76 persen untuk tingkat pendidikan terakhir SMP sederajat. Sedangkan pada jenjang SMA sederajat dan diploma ke atas proporsi penduduk laki-laki yang berijazah cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan dengan nilai 16,27 persen berbanding 12,56 persen untuk pendidikan terakhir SMA sederajat dan 9,56 persen berbanding 8,57 persen untuk tingkat pendidikan terakhir diploma ke atas.

Grafik 8. Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018, diolah

3.6 Akses Teknologi Informasi

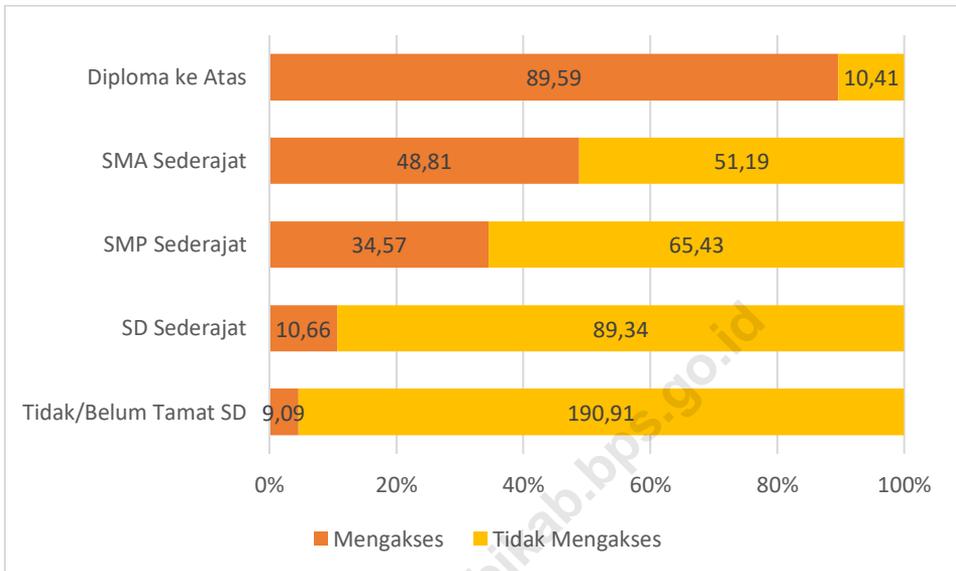
Faktor lain yang turut mempengaruhi kualitas pendidikan adalah akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Jika dimanfaatkan dengan baik maka TIK bisa berperan positif terhadap kemajuan pendidikan. Dengan hadirnya TIK, orang-orang yang tersebar di berbagai tempat bisa saling bertukar informasi atau berinteraksi dengan cepat dan efisien, tidak tergantung pada lokasi mereka ataupun perbedaan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Sebagai contoh, seorang siswa yang tinggal di daerah yang terpencil bisa mengambil informasi atau memperoleh pengetahuan yang sebenarnya terletak ribuan atau bahkan ratusan ribu kilometer darinya.

TIK bisa diakses berbagai sumber diantaranya telepon rumah dan telepon seluler. Perkembangan telepon seluler cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Pesatnya perkembangan teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya persentase kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan telepon seluler. Penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunaannya.

Masyarakat kini cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana, lebih bersifat pribadi, dan tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, tersedianya fitur games, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain.

Pada tahun 2018, penggunaan telepon seluler meningkat 2,1 persen dibanding tahun 2017 menjadi 69,86 persen. Peningkatan pengguna telepon seluler sebanding dengan peningkatan pengguna internet. Media internet digunakan karena memiliki sifat instan, interaktif dan menarik. Pada tahun 2018, secara umum terjadi peningkatan sebesar 2,01 persen terhadap penduduk umur 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir dari waktu pencacahan, dari 19,87 persen di tahun sebelumnya menjadi 21,88 persen. Potensi pengguna internet yang meningkat ini bisa menjadi motivasi bagi dunia bisnis telekomunikasi untuk memperluas jangkauan akses internet yang masih terbatas untuk beberapa wilayah di Kabupaten Wakatobi.

Grafik 9. Persentase Pengguna Internet Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Wakatobi, 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018, diolah

Berdasarkan grafik di atas, dapat kita lihat bahwa pengguna internet didominasi oleh penduduk yang memiliki tingkat pendidikan yang ditamatkan diploma ke atas yaitu sebesar 89,59 persen. Kemudian persentase terbesar kedua berada pada penduduk yang memiliki jenjang pendidikan yang ditamatkan SMA sederajat yaitu sebesar 48,81 persen. Untuk jenjang pendidikan yang ditamatkan SMP sederajat ada sebesar 34,57 persen yang menggunakan internet. Sedangkan penduduk dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah SD sederajat hanya terdapat 10,66 persen yang mengakses internet. Persentase pengguna internet terkecil berada pada penduduk yang tidak memiliki ijazah SD yaitu hanya sebanyak 9,09 persen. Dari Grafik 14 kita dapat mengetahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula persentase seseorang untuk mengakses internet.

<https://www.katobikab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Tabel L1. Jumlah Sekolah di Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2018

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMU/SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binongko	10	13	3	3
Togo Binongko	5	7	3	1
Tomia	17	10	4	3
Tomia Timur	19	13	5	1
Kaledupa	16	13	5	3
Kaledupa Selatan	20	10	6	2
Wangi-wangi	33	22	8	6
Wangi-wangi Selatan	21	22	9	5
Wakatobi	141	110	43	24

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wakatobi

Tabel L2. Jumlah Murid di Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2018

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMU/SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binongko	395	1127	453	605
Togo Binongko	209	694	254	157
Tomia	514	943	390	391
Tomia Timur	511	958	482	428
Kaledupa	572	1098	445	614
Kaledupa Selatan	514	793	478	333
Wangi-wangi	1301	2976	1222	1225
Wangi-wangi Selatan	1060	3018	1271	1189
Wakatobi	5076	11607	4995	4942

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wakatobi

Tabel L3. Jumlah Guru di Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2018

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMU/SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binongko	38	88	46	45
Togo Binongko	17	48	30	7
Tomia	54	76	57	40
Tomia Timur	57	115	62	38
Kaledupa	70	112	60	46
Kaledupa Selatan	77	101	71	27
Wangi-wangi	128	225	123	92
Wangi-wangi Selatan	96	218	113	104
Wakatobi	537	983	562	399

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wakatobi

Tabel L4. Jumlah Sekolah di Luar Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2018

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binongko	0	1	1	1
Togo Binongko	0	0	1	1
Tomia	0	0	1	1
Tomia Timur	1	0	1	0
Kaledupa	1	2	2	1
Kaledupa Selatan	0	0	0	0
Wangi-wangi	7	3	2	1
Wangi-wangi Selatan	4	2	2	1
Wakatobi	13	8	10	6

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi

Tabel L5. Jumlah Murid di Luar Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2018

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binongko	0	43	165	68
Togo Binongko	0	0	72	111
Tomia	0	0	27	57
Tomia Timur	15	0	95	0
Kaledupa	53	183	197	143
Kaledupa Selatan	0	0	0	0
Wangi-wangi	149	218	472	38
Wangi-wangi Selatan	109	439	229	378
Wakatobi	326	883	1257	795

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi

Tabel L6. Jumlah Guru di Luar Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2018

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binongko	0	4	22	15
Togo Binongko	0	0	9	22
Tomia	0	0	13	21
Tomia Timur	4	0	18	0
Kaledupa	5	17	33	14
Kaledupa Selatan	0	0	0	0
Wangi-wangi	34	29	44	13
Wangi-wangi Selatan	15	37	31	41
Wakatobi	58	87	170	126

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi

Tabel L7. Jumlah Sekolah Setingkat Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	0	10	10	0	0	0
Togo Binongko	0	5	5	0	0	0
Tomia	0	17	17	0	0	0
Tomia Timur	0	19	19	0	1	1
Kaledupa	0	16	16	0	1	1
Kaledupa Selatan	0	20	20	0	0	0
Wangi-wangi	0	33	33	0	7	7
Wangi-wangi Selatan	0	21	21	0	4	4
Wakatobi	0	141	141	0	13	13

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L8.. Jumlah Sekolah Setingkat Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	13	0	13	0	1	1
Togo Binongko	7	0	7	0	0	0
Tomia	10	0	10	0	0	0
Tomia Timur	13	0	13	0	0	0
Kaledupa	13	0	13	0	2	2
Kaledupa Selatan	10	0	10	0	0	0
Wangi-wangi	22	0	22	0	3	3
Wangi-wangi Selatan	22	1	23	1	1	2
Wakatobi	110	1	111	1	7	8

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L9. Jumlah Sekolah Setingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	3	0	3	1	0	1
Togo Binongko	3	0	3	0	1	1
Tomia	4	0	4	0	1	1
Tomia Timur	5	0	5	1	0	1
Kaledupa	5	0	5	1	1	2
Kaledupa Selatan	6	0	6	0	0	0
Wangi-wangi	7	1	8	1	1	2
Wangi-wangi Selatan	7	2	9	0	2	2
Wakatobi	40	3	43	4	6	10

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L10. Jumlah Sekolah Setingkat Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	3	0	3	0	1	1
Togo Binongko	1	0	1	1	0	1
Tomia	2	1	3	0	1	1
Tomia Timur	1	0	1	0	0	0
Kaledupa	2	1	3	0	1	1
Kaledupa Selatan	2	0	2	0	0	0
Wangi-wangi	4	2	6	0	1	1
Wangi-wangi Selatan	3	2	5	1	0	1
Wakatobi	18	6	24	2	4	6

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L11. Jumlah Murid Setingkat Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	0	395	395	0	0	0
Togo Binongko	0	209	209	0	0	0
Tomia	0	514	514	0	0	0
Tomia Timur	0	511	511	0	15	15
Kaledupa	0	572	572	0	53	53
Kaledupa Selatan	0	514	514	0	0	0
Wangi-wangi	0	1301	1301	0	149	149
Wangi-wangi Selatan	0	1060	1060	0	109	109
Wakatobi	0	5076	5076	0	326	326

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L12. Jumlah Murid Setingkat Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	1127	0	1127	0	43	43
Togo Binongko	694	0	694	0	0	0
Tomia	943	0	943	0	0	0
Tomia Timur	958	0	958	0	0	0
Kaledupa	1098	0	1098	0	183	183
Kaledupa Selatan	793	0	793	0	0	0
Wangi-wangi	2976	0	2976	0	218	218
Wangi-wangi Selatan	2931	87	3018	289	150	439
Wakatobi	11520	87	11607	289	594	883

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L13. Jumlah Murid Setingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	453	0	453	165	0	165
Togo Binongko	254	0	254	0	72	72
Tomia	390	0	390	0	27	27
Tomia Timur	482	0	482	95	0	95
Kaledupa	445	0	445	137	60	197
Kaledupa Selatan	478	0	478	0	0	0
Wangi-wangi	1139	83	1222	434	38	472
Wangi-wangi Selatan	1129	142	1271	0	229	229
Wakatobi	4770	225	4995	831	426	1257

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L14. Jumlah Murid Setingkat Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	605	0	605	0	68	68
Togo Binongko	157	0	157	111	0	111
Tomia	364	27	391	0	57	57
Tomia Timur	428	0	428	0	0	0
Kaledupa	579	35	614	0	143	143
Kaledupa Selatan	333	0	333	0	0	0
Wangi-wangi	1236	95	1331	0	38	38
Wangi-wangi Selatan	941	142	1083	378	0	378
Wakatobi	4643	299	4942	489	306	795

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L15. Jumlah Guru Setingkat Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	0	38	38	0	0	0
Togo Binongko	0	17	17	0	0	0
Tomia	0	54	54	0	0	0
Tomia Timur	0	57	57	0	4	4
Kaledupa	0	70	70	0	5	5
Kaledupa Selatan	0	77	77	0	0	0
Wangi-wangi	0	128	128	0	34	34
Wangi-wangi Selatan	0	96	96	0	15	15
Wakatobi	0	537	537	0	58	58

Sumber : Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L16. Jumlah Guru Setingkat Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	88	0	88	0	4	4
Togo Binongko	48	0	48	0	0	0
Tomia	76	0	76	0	0	0
Tomia Timur	115	0	115	0	0	0
Kaledupa	112	0	112	0	17	17
Kaledupa Selatan	101	0	101	0	0	0
Wangi-wangi	225	0	225	0	29	29
Wangi-wangi Selatan	210	8	218	24	13	37
Wakatobi	88	0	88	0	4	4

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L17. Jumlah Guru Setingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	46	0	46	22	0	22
Togo Binongko	30	0	30	0	9	9
Tomia	57	0	57	0	13	13
Tomia Timur	62	0	62	18	0	18
Kaledupa	60	0	60	21	12	33
Kaledupa Selatan	71	0	71	0	0	0
Wangi-wangi	117	6	123	35	9	44
Wangi-wangi Selatan	104	9	113	0	31	31
Wakatobi	547	15	562	96	74	170

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L18. Jumlah Guru Setingkat Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2018

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	45	0	45	0	15	15
Togo Binongko	7	0	7	22	0	22
Tomia	32	8	40	0	21	21
Tomia Timur	38	0	38	0	0	0
Kaledupa	46	0	46	0	14	14
Kaledupa Selatan	27	0	27	0	0	0
Wangi-wangi	96	8	104	0	13	13
Wangi-wangi Selatan	79	13	92	41	0	41
Wakatobi	370	29	399	63	63	126

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L19. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Binongko, 2018

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	10	395	38
Sekolah Dasar	13	1127	88	0	0	0
SLTP	3	453	46	0	0	0
SMU/SMK	3	605	45	0	0	0
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	0	0	0
Madrasah Ibtidaiyah	0	0	0	1	43	4
Madrasah Tsanawiyah	1	165	22	0	0	0
Madrasah Aliyah	0	0	0	1	68	15

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L20. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Togo Binongko, 2018

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	5	209	17
Sekolah Dasar	7	694	48	0	0	0
SLTP	3	254	30	0	0	0
SMU/SMK	1	157	7	0	0	0
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	0	0	0
Madrasah Ibtidaiyah	0	0	0	0	0	0
Madrasah Tsanawiyah	0	0	0	1	72	9
Madrasah Aliyah	1	111	22	0	0	0

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L21. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Tomia, 2018

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	17	514	54
Sekolah Dasar	10	943	76	0	0	0
SLTP	4	390	57	0	0	0
SMU/SMK	2	364	32	1	27	8
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	0	0	0
Madrasah Ibtidaiyah	0	0	0	0	0	0
Madrasah Tsanawiyah	0	0	0	1	27	13
Madrasah Aliyah	0	0	0	1	57	21

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L22. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Tomia Timur, 2018

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	19	511	57
Sekolah Dasar	13	958	115	0	0	0
SLTP	5	482	62	0	0	0
SMU/SMK	1	428	38	0	0	0
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	1	15	4
Madrasah Ibtidaiyah	0	0	0	0	0	0
Madrasah Tsanawiyah	1	95	18	0	0	0
Madrasah Aliyah	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L23. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Kaledupa, 2018

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	16	572	70
Sekolah Dasar	13	1098	112	0	0	0
SLTP	5	445	60	0	0	0
SMU/SMK	2	579	46	1	35	0
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	1	53	5
Madrasah Ibtidaiyah	0	0	0	2	183	17
Madrasah Tsanawiyah	1	137	21	1	60	12
Madrasah Aliyah	0	0	0	1	143	14

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L24. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Kaledupa Selatan, 2018

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	20	514	77
Sekolah Dasar	10	793	101	0	0	0
SLTP	6	478	71	0	0	0
SMU/SMK	2	333	27	0	0	0
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	0	0	0
Madrasah Ibtidaiyah	0	0	0	0	0	0
Madrasah Tsanawiyah	0	0	0	0	0	0
Madrasah Aliyah	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L25. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Wangi-Wangi, 2018

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	33	1301	128
Sekolah Dasar	22	2976	225	0	0	0
SLTP	7	1139	117	1	83	6
SMU/SMK	4	1236	96	2	95	8
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	7	149	34
Madrasah Ibtidaiyah	0	0	0	3	218	29
Madrasah Tsanawiyah	1	434	35	1	38	9
Madrasah Aliyah	0	0	0	1	38	13

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L26. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 2018

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	21	1060	96
Sekolah Dasar	22	2931	210	1	87	8
SLTP	7	1129	104	2	142	9
SMU/SMK	3	941	79	2	142	13
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	4	109	15
Madrasah Ibtidaiyah	1	289	24	1	150	13
Madrasah Tsanawiyah	0	0	0	2	229	31
Madrasah Aliyah	1	378	41	0	0	0

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L27. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kabupaten Wakatobi, 2018

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	141	5076	537
Sekolah Dasar	110	11520	975	1	87	8
SLTP	40	4770	547	3	225	15
SMU/SMK	18	4643	370	6	299	29
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	13	326	58
Madrasah Ibtidaiyah	1	289	24	7	594	63
Madrasah Tsanawiyah	4	831	96	6	426	74
Madrasah Aliyah	2	489	63	4	306	63

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WAKATOBI**

Jalan Lili-dae Sawad No. 05, Km. Manjar III,
Des. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, 91795
Telp. (0844) 2121003
Home page: <http://wakatobi.bps.go.id>
Email: bps@bps.go.id